

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa bukan sekadar sarana komunikasi dalam kajian Analisis Wacana Kritis bahasa tidak pernah netral. Bahasa juga sebagai alat untuk membangun citra, mengendalikan narasi publik, serta menanamkan ideologi tertentu. Melalui bahasa, seorang pemimpin dapat membingkai peristiwa dan menentukan bagaimana masyarakat memaknainya. Oleh karena itu, dalam setiap pidato politik, terutama pada momen krisis sosial, bahasa berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk kesadaran kolektif.

Dalam konteks politik Indonesia, pidato seorang presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pernyataan resmi negara dan sebagai strategi komunikasi politik. Pidato menjadi wadah pembentukan makna sosial yang berperan dalam mengarahkan opini publik, membangun citra kepemimpinan, serta memperkuat legitimasi kekuasaan. Beard (2000: 80) menjelaskan bahwa pidato politik merupakan bentuk komunikasi persuasif yang menggunakan bahasa untuk memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak khalayak. Karena itu, analisis terhadap pidato presiden penting dilakukan untuk mengungkap makna ideologis di balik pilihan bahasanya.

Salah satu peristiwa wacana politik yang penting untuk dikaji adalah pidato Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 31 Agustus 2025, Pidato tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan kehadiran para ketua umum partai koalisi pemerintah. Penyampaian pidato itu merupakan bentuk tanggapan pemerintah terhadap maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah wilayah yang memprotes sejumlah kebijakan nasional, terutama terkait peningkatan harga kebutuhan pokok dan persoalan ketimpangan ekonomi. Aksi tersebut bahkan menyebabkan bentrokan di lapangan, salah satu demonstran, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis polisi. Peristiwa ini memunculkan kritik tajam terhadap pemerintah dan aparat keamanan, serta menjadi topik nasional di berbagai media.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan agar masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh tindakan anarkis. Ia

menegaskan bahwa negara menghormati penyampaian aspirasi, akan tetapi mengingatkan bahwa kebebasan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pidato tersebut memuat kalimat seperti.

Negara akan menindak tegas pihak-pihak yang membuat kekacauan dan mengancam persatuan bangsa serta Kami menghormati aspirasi rakyat, tapi jangan biarkan kelompok tertentu menciptakan huru-hara.

Diksi-diksi seperti tindak tegas, kekacauan, dan huru-hara menunjukkan posisi wacana kekuasaan yang menekankan stabilitas dan ketertiban sebagai nilai moral negara. Dengan demikian, pidato ini bukan hanya tanggapan atas situasi, melainkan juga bentuk intervensi ideologis untuk menegaskan posisi pemerintah sebagai pengendali tatanan sosial.

Wacana tersebut kemudian dikonstruksi ulang oleh media massa dengan cara yang berbeda-beda. *Tempo*, dalam laporannya “Pidato Lengkap Prabowo Menyikapi Demo Berujung Penjarahan” pada tanggal 31 Agustus 2025, memuat naskah pidato lengkap disertai sorotan terhadap nada keras Prabowo dan keterlambatan pemerintah merespons keresahan publik. Artikel lain seperti “Narasi Prabowo Menyikapi Demonstrasi” dan “Poin-poin Pidato Prabowo Soal Kematian Affan Kurniawan” memperlihatkan *framing* yang lebih kritis, menyoroti kontradiksi antara retorika moral pemerintah dan realitas di lapangan. Sementara itu, *Media Indonesia* menampilkan pidato tersebut sebagai wacana penenang dan simbol kepemimpinan tegas. Dalam berita berjudul “Presiden Prabowo Minta TNI-Polri Tindak Tegas Demo Anarkis” dan “Prabowo: Negara Hormati Segala Bentuk Penyampaian Aspirasi”, media ini menonjolkan sisi moral, nasionalisme, dan ajakan untuk menjaga demokrasi. Bahkan pada tajuk “Prabowo Pembakaran Gedung DPRD Adalah Tindakan Makar”, media ini memperkuat citra Presiden sebagai figur penegak hukum dan ketertiban.

Perbedaan konstruksi makna antara *Tempo* dan *Media Indonesia* menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyalurkan informasi, melainkan juga membentuk wacana ideologis sesuai dengan posisi dan orientasi

politiknya masing-masing. *Tempo* cenderung bersikap kritis terhadap kekuasaan dan memberi ruang bagi suara masyarakat sipil, sedangkan *Media Indonesia* lebih mengutamakan stabilitas politik dan legitimasi pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu teks politik yang sama dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada posisi ideologis media yang memproduksinya.

1. Aksi mahasiswa yang awalnya berlangsung damai di sejumlah kota berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan setelah demonstrasi menolak kebijakan DPR memanas. (Tempo.co, 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa *Tempo* menyoroti akar aksi, yaitu kebijakan DPR yang memicu kemarahan publik. Narasi dimulai dari aksi damai hingga kerusuhan, menggambarkan eskalasi sosial yang tidak dilepaskan dari konteks politik. Pemilihan fokus ini memperlihatkan sikap kritis *Tempo* sebagai media yang menempatkan kebijakan pemerintah sebagai latar penyebab munculnya konflik, bukan hanya menyoroti perilaku massa.

2. Negara tidak akan membiarkan kelompok mana pun yang mencoba membuat kekacauan dan ketidakstabilan. (Tempo.co, 2025).

Diksi “tidak akan membiarkan” dan “kekacauan” menggambarkan posisi tegas pemerintah dalam merespons aksi. *Tempo* memilih menampilkan bagian pidato yang mencerminkan otoritas negara dan pendekatan keamanan. Penekanan ini membuka ruang interpretasi bahwa wacana kekuasaan digunakan untuk menegaskan kendali dan legitimasi tindakan negara atas dinamika sosial.

3. Aksi demo pada 25 Agustus menjadi alarm keras bagi seluruh elite politik untuk lebih mendengar aspirasi publik dan menjaga stabilitas nasional. (MediaIndonesia.com, 2025)

Kutipan ini memperlihatkan *framing* yang lebih moderat. *Media Indonesia* menafsirkan demonstrasi sebagai peringatan politik sekaligus ajakan untuk dialog dan stabilitas. Istilah “alarm keras” mengindikasikan urgensi, namun tetap dalam kerangka solusi damai dan respons empatik dari pemerintah.

4. Presiden Prabowo meminta TNI–Polri bertindak tegas terhadap aksi anarkis demi menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat. (MediaIndonesia.com, 2025)

Framing Media Indonesia menegaskan legitimasi tindakan pemerintah dan aparat negara dalam merespons situasi demonstrasi. Pemberitaan media ini berfokus pada posisi presiden sebagai pelindung keamanan publik, sehingga memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap stabilitas, ketertiban, dan pengendalian sosial. Dengan demikian, *Media Indonesia* cenderung tampil lebih pro-otoritas karena memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang sah dan bertanggung jawab dalam menjaga keteraturan sosial.

Konteks inilah yang menjadi alasan mengapa Analisis Wacana Kritis (AWK), khususnya model Norman Fairclough, relevan digunakan untuk penelitian ini. Fairclough memandang bahasa sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan kekuasaan dan ideologi. Ia berpendapat bahwa ada tiga dimensi, (1) Dimensi Teks, yaitu kajian linguistik terhadap pilihan kata, metafora, dan struktur kalimat, (2) Praktik Wacana, yaitu proses produksi dan konsumsi teks, (3) Praktik Sosial-budaya, yaitu konteks sosial, politik, ideologis, dan hegemoni yang melingkupi teks. Melalui kerangka ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana pidato Presiden Prabowo dikonstruksi sebagai wacana kekuasaan dan bagaimana media mengolahnya menjadi sarana pembentukan opini publik.

Fairclough mengadopsi pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni untuk memperkuat analisis ini. Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dijaga dengan cara-cara pemaksaan, melainkan juga melalui pembentukan penerimaan sosial yang ditanamkan melalui ideologi. Dalam

konteks pidato dan media, hegemoni bekerja ketika nilai-nilai seperti “stabilitas”, “persatuan”, dan “ketaatan hukum” dijadikan sebagai norma moral bersama yang sulit dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan teks pidato, tetapi juga mengungkap bagaimana bahasa menjadi alat dominasi yang disamarkan sebagai moralitas politik. Gramsci berbicara tentang ideologi yang menembus masyarakat lewat “*common sense*”, Fairclough menjelaskan bagaimana ideologi itu ditanamkan melalui sebuah wacana (*discourse*).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas analisis wacana kritis terhadap pidato tokoh politik. Namun, belum secara spesifik mengkaji pidato Presiden Prabowo Subianto dalam konteks demonstrasi mahasiswa dan perbandingan pemberitaan di media. Dijelaskan oleh Penelitian Rahmawati (2021:13) berjudul “*Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden Joko Widodo pada Masa Pandemi Covid-19*” menunjukkan bagaimana strategi kebahasaan digunakan untuk membangun citra kepemimpinan yang empatik. Penelitian Lestari (2022:10) berjudul “*Representasi Ideologi dalam Pemberitaan Media Nasional tentang Konflik Politik*” menyoroti perbedaan *framing* antara Kompas dan Republika, sementara Arifin (2023:20) dalam penelitiannya “*Bahasa Kekuasaan dalam Pidato Ketua DPR*” menemukan adanya pola penggunaan metafora moral untuk memperkuat legitimasi politik. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan model Fairclough, akan tetapi berfokus pada konteks dan tokoh yang berbeda.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, penelitian ini mengkaji pidato politik yang terjadi dalam situasi krisis sosial aktual, yaitu demonstrasi mahasiswa yang jarang disentuh oleh penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan dua sumber media dengan orientasi ideologis berbeda, yaitu *Tempo* dan *Media Indonesia*, sehingga memungkinkan analisis komparatif terhadap representasi wacana kekuasaan dalam ruang publik. Ketiga, penelitian ini tidak terbatas pada kajian unsur kebahasaan dalam pidato, melainkan turut menelaah bagaimana ideologi dibentuk dan disebarkan kembali melalui teks pemberitaan media. Secara keseluruhan, penelitian ini

ditujukan untuk menawarkan sumbangan teoretis maupun empiris dalam mengkaji keterkaitan antara praktik berbahasa, relasi kuasa, serta peran media pada situasi politik Indonesia masa kini.

Selain memberikan kontribusi teoretis dalam kajian wacana politik, hasil penelitian ini juga memiliki nilai aplikatif dalam bidang pendidikan, khususnya pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Keterampilan menganalisis teks berita menjadi bagian penting dalam pengembangan literasi kritis peserta didik. Menurut Kosasih (2018), pembelajaran teks berita tidak hanya menekankan pada kemampuan memahami struktur dan kebahasaan, tetapi juga melatih siswa menilai fakta dan opini secara objektif. Sejalan dengan Kurikulum Merdeka, pembelajaran ini diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi publik, terutama terhadap berita yang berhubungan dengan isu sosial dan politik.

Pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai video pembelajaran teks berita didasarkan pada beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pembelajaran teks berita di sekolah. Pertama, pembelajaran teks berita pada umumnya masih lebih menekankan aspek struktur dan unsur kebahasaan, sehingga peserta didik cenderung memahami berita pada tingkat permukaan dan belum diarahkan pada pembacaan yang lebih kritis. Kedua, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam membedakan fakta dan opini, padahal kemampuan tersebut sangat penting dalam memahami teks berita secara tepat. Ketiga, pembelajaran teks berita di sekolah belum sepenuhnya mengarahkan peserta didik untuk menyadari bahwa berita tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan dibentuk melalui bahasa yang dapat membangun opini, mengonstruksi realitas, dan merepresentasikan kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari (2022:251) bahwa analisis wacana kritis dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena seluruh materi pokok diajarkan berbasis teks, dan dalam pembelajaran teks berita peserta didik tidak hanya membaca berita, tetapi juga perlu menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk opini dan merepresentasikan berbagai kepentingan.

Keempat, media pembelajaran yang digunakan pada materi teks berita masih cenderung konvensional, sehingga kurang menarik minat peserta didik dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif mereka dalam membaca berita secara kritis. Dalam konteks ini, penggunaan video pembelajaran menjadi relevan karena media pembelajaran berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik agar proses belajar berlangsung lebih efektif. Media video sebagai media audiovisual mampu memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, serta membantu mengurangi sifat pasif peserta didik dalam pembelajaran (Daniyati et al., 2023:285; Yuanta, 2019:180). Di samping itu, pembelajaran teks berita sendiri pada kurikulum Bahasa Indonesia tidak hanya menekankan pemahaman isi, tetapi juga diarahkan pada pengembangan literasi kritis agar peserta didik mampu menilai bagaimana berita dikonstruksi, ideologi apa yang dibawanya, dan bagaimana bahasa digunakan untuk memengaruhi cara pandang pembaca Priyatni (2014: 33). Oleh karena itu, hasil penelitian ini dipandang relevan untuk dimanfaatkan sebagai video pembelajaran teks berita, karena dapat membantu peserta didik memahami berita tidak hanya dari segi struktur, tetapi juga dari segi *framing*, ideologi, dan relasi kuasa yang bekerja di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk hegemoni kekuasaan media *Tempo* dan *Media Indonesia* dalam berita pidato Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Analisis Wacana Kritis perspektif Norman Fairclough?
2. Bagaimana hasil analisis wacana kritis berita pidato Presiden Prabowo Subianto dapat dimanfaatkan sebagai video pembelajaran teks berita di kelas SMA XII?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk hegemoni kekuasaan media *Tempo* dan *Media Indonesia* dalam berita pidato Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Analisis Wacana Kritis perspektif Norman Fairclough.
2. Menjelaskan pemanfaatan hasil analisis wacana kritis berita pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai video pembelajaran teks berita di SMA kelas XII.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Analisis Wacana Kritis (AWK), terutama penerapan model tiga dimensi Norman Fairclough yang mengaitkan antara teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai sarana pembentukan ideologi dan kekuasaan dalam wacana politik, serta memperkuat relevansi teori hegemoni Antonio Gramsci dalam analisis bahasa dan media.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami cara kerja bahasa dalam membentuk makna dan pandangan tertentu, sehingga siswa lebih kritis dalam membaca teks-teks politik maupun pemberitaan media..
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada materi analisis teks pidato dan teks argumentatif yang mengandung nilai-nilai ideologis serta unsur kebahasaan yang kritis
- c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya peningkatan kualitas pembelajaran literasi kritis, dengan menanamkan

kesadaran akan pentingnya kemampuan berpikir analitis terhadap teks publik.

- d. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar pengembangan penelitian sejenis, khususnya dalam kajian wacana politik, media, dan kekuasaan.
- e. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pesan-pesan politik dalam pidato dan media, serta membantu memahami bagaimana bahasa dapat membentuk opini dan pandangan sosial di masyarakat.

